

PERSEPSI DEMOKRASI INDONESIA DI ARAB SAUDI ANALISIS FRAMMING BERITA PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2019 DI SITUS ARABNEWS.COM

Mustafa

Email: mustafa@uin-suska.ac.id
Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Abstact

The 2019 Presidential Election of the Republic of Indonesia, which brought Joko Widodo to power for the second time, led to various democratic events both before, or after the vote. This general election appeals to the mass media not only the media in Indonesia but also the international media. This article attempts to explain how the framing carried out by the media in the Kingdom of Saudi Arabia over the democratic process that occurred in Indonesia. To some extent, this analysis supports the claim: throughout the election, the Saudi Arabian media offered several substantive criticisms of democracy in Indonesia.

Keyword : Frame Analysis, Indonesia, Presidential Elections

Pendahuluan

Analisis ini bergantung pada bahan sumber yang dikumpulkan dari Arab News, yang didirikan pada tahun 1975 sebagai surat kabar berbahasa Inggris pertama di Arab Saudi. Diproduksi oleh Perusahaan Penelitian dan Penerbitan Saudi, ketuanya adalah anggota keluarga kerajaan, Pangeran Badr bin Abdullah Al-Saud. Dengan

sirkulasi harian diperkirakan lebih dari 50.000, dan 'ratusan ribu hit setiap hari' pada edisi online-nya, Arab News bertujuan untuk 'memberikan perspektif Saudi dalam bahasa Inggris' (Arab News, 2016 a). Lebih daripada kebanyakan negara Arab lainnya, media Saudi diklasifikasikan sebagai 'loyalis', artinya mereka mendukung rezim dalam semua 'masalah penting', termasuk

kebijakan publik, kepemimpinan, dan agama (Rugh, 2004:65). Wartawan yang 'melanggar garis merah sensor' diancam hukuman mulai dari pengangguran hingga cambuk dan eksekusi (Yamani, 2008: 148).

Satu studi terhadap pers Arab Saudi telah menunjukkan bahwa hal itu didorong oleh 'kesan keamanan' di mana media yang dimaksudkan untuk konsumsi domestik dirancang untuk melindungi dari pengaruh eksternal yang tidak diinginkan, sementara yang dirancang untuk distribusi eksternal adalah kunci untuk menggunakan kekuatan di seluruh wilayah. (Zayani, 2012).

Sebagai makalah utama yang berbahasa Inggris dari rezim tersebut, Arab News memenuhi kedua elemen 'keharusan keamanan' ini - untuk menafsirkan berita asing ke audiens domestik (Inggris) dan untuk mempromosikan pandangan rezim di luar negeri.

Selain itu, di banyak negara berkembang, status elit dan fokus internasional berbahasa Inggris tidak hanya memainkan peran berpengaruh

dalam membentuk pendapat elit (Nambiar, 2014) tetapi juga lebih dekat dalam hal kualitas yang signifikan seperti The New York Times (Schaefer, 2004). Ini juga berlaku untuk berita berbahasa Inggris di Timur Tengah (Isakhan, 2007), yang cenderung 'lebih eksplisit, terbuka, dan jauh jangkauannya' daripada rekan-rekan mereka yang berbahasa lokal (Rubin, 2006: 4).

Semua ini menunjukkan bahwa Arab News memainkan peran 'agenda setting' dalam Kerajaan Arab Saudi dalam hal itu membentuk wacana politik dan debat publik (McCombs dan Shaw, 2006). Ini membantu asumsi bahwa Berita Arab layak untuk dipelajari karena menyoroti kepentingan, pendapat, dan kepercayaan para penulis yang, secara kolektif, menulis dengan dukungan atau keterlibatan rezim kepada audiensi baik elit lokal maupun ekspatriat di dalam negeri Arab Saudi dan ke dunia berbahasa Inggris di luar negeri.

Untuk secara akurat menangkap tekstur dan berbagai pendapat yang diungkapkan pemilihan Presiden

Indonesia di Arab News, peneliti mengumpulkan data berita dalam jangka waktu hampir 10 bulan (Agustus 2018–Mei 2019). Rentang waktu ini dipilih karena mencakup seluruh proses mulai dari pencalonan kandidat, kampanye, pemilihan umum, pengumuman pemenang, serta konflik yang terjadi pasca pemilihan.

Teori dan Metode

Framing adalah suatu proses di mana para aktor politik, pembuat kebijakan, manajer kampanye, dan jurnalis dapat menyaring posisi-posisi rumit pada isu tertentu untuk menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diingat (Pan dan Kosicki, 1993).

Selama siklus pemilihan, misalnya, pembingkai adalah kendaraan yang melaluinya wartawan dan komentator dapat menawarkan serangkaian skema interpretatif atau narasi yang terbuka yang memungkinkan audiens menginterpretasikan kompleksitas agenda kebijakan kandidat (Gitlin, 1980;

Tuchman, 1978; Nwokora dan Brown 2017).

Dalam melakukan hal itu, bingkai juga berfungsi untuk mengaburkan setidaknya sebanyak yang diterangi dengan banyak yang tertinggal dari gambar untuk kepentingan menembus, dan beresonansi dengan audiens yang dituju (Entman, 1993).

Cara isu atau peristiwa tertentu dibingkai memiliki dampak signifikan pada kesadaran publik, mengingat bahwa warga negara mungkin memiliki sedikit sumber informasi lain (Entman, 1991). Dengan demikian, analisis kerangka telah diterapkan pada liputan media tentang beragam peristiwa dan masalah yang berkaitan dengan Timur Tengah dan Islam: dari perang Irak tahun 2003 dan pertempuran yang lebih baru melawan 'Negara Islam' (Isakhan, 2014; Mulherin dan Isakhan, 2019); untuk liputan Musim Semi Arab (Al-Rawi, 2015; Guzman, 2016; Oz, 2016), melalui kontroversi seputar pembangunan masjid di kota-kota Amerika atau penerbitan 'kartun Mohammad' di surat kabar Eropa (Bowe dan Makki, 2015; Strömbäck et al, 2008),

dan ke arah persatuan terorisme dan agama Islam di media global arus utama (Powell, 2011; Rane and Ewart, 2012).

Ada dua pendekatan berbeda untuk analisis framing tersebut. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif yang biasanya menggunakan program komputer untuk mencari dan menghitung kata-kata kunci dan kemudian mengisolasi set frame sebelum menentukan keunggulan dan frekuensinya (Miller, 1997).

'Pemetaan bingkai' ini memiliki keuntungan karena mampu menganalisis sejumlah besar data untuk menyediakan berbagai analisis statistik. Namun, pendekatan ini cenderung tidak peka terhadap konteks komunikasi: ketika diperlakukan independen dari konteksnya, sebuah kata dapat dibalik dari makna yang dimaksudkan atau dilucuti dari seluk-beluk penting.

Dengan demikian, metode kuantitatif murni dapat memberitahu peneliti bahwa sebuah surat kabar tertentu telah menyebutkan 'Joko Widodo dan 'Prabowo' puluhan selama periode tertentu, tetapi tanpa analisis kualitatif yang cermat dari artikel yang

bersangkutan, nada atau konteks keseluruhan tidak bisa dimengerti.

Pendekatan kedua mengatasi masalah ini dengan menyediakan analisis kualitatif bahan sumber. Di sini, peneliti harus menerapkannya 'keahlian untuk menginduksi makna teks', termasuk keakraban mereka dengan topik, kemampuan mereka untuk mengidentifikasi struktur yang berkembang dan narasi dari frame yang digunakan, dan 'pertanyaan penting tentang apa yang mungkin ada dalam konten tetapi tidak dituliskan' (Hertog dan McLeod, 2001: 154).

Artikel ini menggunakan pendekatan interpretatif sistematis ini untuk membaca teks untuk menghindari kondensasi makna yang tersirat dalam pendekatan kuantitatif. Mengikuti studi sebelumnya yang berupaya menganalisis secara kritis kerangka yang menopang liputan kandidat selama pemilihan (Bosman dan D'Haenens, 2008; Dekavalla, 2016; Strömbäck dan Dimitrova, 2006), penelitian ini menerapkan analisis framing untuk memeriksa cara-cara di mana pemilihan

Presiden Indonesia dibingkai dalam Berita Arab.

Analisis ini mengungkapkan bahwa tiga kerangka luas dikerahkan oleh Arab News untuk menafsirkan Pemilihan Presiden Indonesia 2019 yakni naiknya Joko Widodo, berita palsu, politik uang dan kerusuhan. Namun, sebelum memeriksa ketiga kerangka ini, dari 20 artikel yang dianalisis, kerangka yang paling menonjol adalah berita palsu 10 artikel. Dua kerangka yang tersisa berfokus pada isu-isu khusus yang muncul selama kampanye: di antaranya, politik uang diikuti oleh Joko Widodo.

Berdasarkan angka-angka ini, Arab News tampak lebih peduli dengan menganalisis apa itu Pemilihan presiden Indonesia mengungkapkan tentang demokrasi itu sendiri ('persepsi demokrasi') daripada mempertimbangkan konsekuensi politik.

Hasil

Bingkai 1, Joko Widodo

Dalam bingkai Arab News Joko Widodo digambarkan sebagai pengeksportir furnitur, yang berusia 57 tahun menjadi terkenal ketika ia terpilih sebagai gubernur ibukota Jakarta pada tahun 2012 setelah sukses sebagai walikota kota kelahirannya Solo.

Dibesarkan di gubuk bambu di daerah kumuh di tepi sungai, dia orang yang rendah hati dan kecintaannya pada headbangers Metallica terbukti menjadi hit dengan pemilih yang muak dengan elit yang cenderung korupsi.

Joko Widodo disebut Arab News telah memilih seorang ulama Islam konservatif sebagai pasangannya yakni Ma'ruf Amin. Dalam pandangan Arab News meski memilih Ma'ruf sebagai calon Wakil Presiden, dan membuat sebagian kaum liberal kecewa tetapi para analis mengatakan itu menopang posisinya di antara Muslim konservatif yang menunjukkan kekuatan politik mereka tahun lalu dengan penggulingan gubernur minoritas Kristen Jakarta yang kemudian dipenjara karena penistaan agama.

Jokowi juga digambarkan sebagai presiden Indonesia pertama dari luar militer dan elit politik. Ma'ruf Amin digambarkan sebagai sosok yang pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang berpengaruh dan dewan penasihat Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di dunia. Adapun mantan jenderal Prabowo Subianto, menggandeng pengusaha dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.

Arab News juga menunjukkan bagaimana pendukung Joko Widodo menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Prabowo Subianto memenangkan kursi kepresidenan, dia akan mendukung pembentukan kekhalifahan Islam dan mengubah ideologi negara.

Joko Widodo dianggap sebagai sosok yang memperjuangkan proyek ambisius untuk membangun jalan, bandara, dan infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan di seluruh kepulauan lebih dari 17.000 pulau, termasuk sistem angkutan cepat massal pertama di Jakarta.

Joko Widodo juga mengantar atau memperluas skema pembangunan kesehatan dan sosial populer, termasuk

uang tunai untuk masyarakat miskin pedesaan.

Tetapi Joko Widodo juga digambarkan mengalami serangan-serangan diskriminatif karena dianggap tidak tegas terhadap komunitas kecil LGBT Indonesia selama masa jabatannya, dan kasus-kasus intoleransi tingkat tinggi yang diarahkan pada kelompok-kelompok minoritas agama di negara mayoritas Muslim.

Dia juga dituduh merayap otoriterianisme menyusul penangkapan para pegiat oposisi dan undang-undang yang direvisi yang memungkinkan Jakarta melarang organisasi massa.

Dipandang sebagai orang yang lemah dan jauh dari kedalaman di tahun pertamanya menjabat, Joko Widodo mengkonsolidasikan kekuasaan sebagian dengan menunjuk jenderal-jenderal angkatan darat Soeharto ke posisi-posisi penting.

Adapun rivalnya Prabowo Subianto, digambarkan sebagai mantan jenderal - dan mantan suami dari satu putri Soeharto - menghadapi perjuangan berat lainnya pada tahun 2019, tertinggal

dua digit dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum.

Prabowo juga diberitakan berkali-kali mencoba dan gagal memenangkan jabatan tinggi beberapa kali selama 15 tahun terakhir, termasuk pencalonan wakil presiden tahun 2009 yang gagal.

Prabowo diberitakan terikat oleh ikatan dengan keluarga Soeharto dan masa lalu yang kelam. Prabowo Subianto memerintahkan penculikan aktivis demokrasi pada hari-hari terakhir pemerintahan diktator pada tahun 1998 dan telah dituduh melakukan kekejaman di Timor Timur. Dia dipecat dari militer karena penculikan.

Prabowo Subianto telah berusaha menggambarkan dirinya sebagai pembela bangsa yang akan meningkatkan pengeluaran militer, dan menuduh Widodo menjual negara kaya mineral itu untuk kepentingan asing, termasuk Cina.

Dia telah mendekati kelompok garis keras Islam dan - meskipun dirinya sendiri sangat kaya - mencerca para elit negara, mengklaim mereka mengeksploitasi orang miskin.

Beberapa komentator mengatakan bahwa pria 67 tahun yang berpendidikan di luar negeri ini percaya dia ditakdirkan untuk memimpin Indonesia.

Sandiaga Uno seorang mantan pemodal berusia 49 tahun yang dilaporkan telah menghabiskan sekitar \$ 100 juta dari kekayaannya sendiri untuk kampanye ini, telah populer di kalangan milenial dan ibu rumah tangga.

Dalam berita 3 April 2019 Arab News memberitakan Joko Widodo berada di jalur untuk memenangkan pemilihan negara 17 April, menurut jajak pendapat atau survey terbaru.

Sebuah survei yang dilakukan oleh jajak pendapat swasta Indo Barometer mengungkapkan. Dari 1.200 orang yang diperiksa, 50,8 persen mengindikasikan mereka akan memilih presiden dan calon wakilnya, ulama Muslim berusia 76 tahun, Ma'ruf Amin.

Subianto dan kandidat wakil presidennya, taipan yang berubah menjadi politisi Sandiaga Salahuddin Uno, 49, memperoleh 32 persen dukungan, sementara 17,2 persen responden abstain atau ragu-ragu.

Peneliti Indo Barometer Hadi Suprpto Rusli mengatakan catatan Widodo sejak menjabat pada Oktober 2014 ditambah dengan kepercayaan Islamnya akan menjadi faktor kunci dalam dirinya mengamankan kemenangan pemilu.

"Survei ini menemukan bahwa mayoritas pemilih Muslim berpikir Widodo adalah representasi aspirasi Muslim yang lebih baik dibandingkan dengan Subianto," kata Rusli.

Dia menambahkan bahwa kemitraan Widodo dengan Amin telah menjadi "pengambil suara" Muslim dan telah membantu untuk menahan serangan terhadapnya dan pemerintahnya atas kebijakan yang tidak dilihat oleh beberapa orang sebagai orang yang ramah terhadap Muslim.

Rusli mengatakan kepada Arab News bahwa jajak pendapat itu juga menunjukkan bahwa beberapa program pro-Muslim presiden, seperti pemberdayaan kewirausahaan bagi siswa sekolah asrama Islam, telah terbukti populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Pendukung Widodo menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Subianto memenangkan kursi kepresidenan, dia akan mendukung pembentukan kekhalifahan Islam dan mengubah ideologi negara.

Namun, Subianto menepis klaim tersebut. "Ini tidak masuk akal," kata Subianto. "Ibu saya adalah seorang Kristen. Pada usia 18 tahun, saya mempertaruhkan hidup saya (dengan bergabung dengan militer) untuk memperjuangkan Pancasila (ideologi negara). Saya bertaruh pada hidup saya untuk republik ini. Bagaimana saya bisa dituduh mengubah Pancasila, sangat kejam? "

Sebuah survei terpisah terhadap 1.102 pemilih, oleh pengumpul pendapat Roy Morgan, menunjukkan hasil yang serupa dengan Widodo mendapatkan 56,5 persen dukungan pada Maret - turun 0,5 persen pada angka Februari - dibandingkan dengan 43,5 persen Subianto, yang naik 0,5 persen dari Februari.

Michele Levine, CEO Roy Morgan, mengatakan Selasa: "Dukungan untuk Subianto adalah yang

terkuat di ibu kota Indonesia di Jakarta, provinsi-provinsi di sekitar Jawa Barat dan Banten, bersama dengan provinsi Sumatra Selatan. Widodo terkuat di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. ”

Jajak pendapat terbaru kemungkinan akan meningkatkan kepercayaan untuk Widodo dan pendukungnya, setelah survei bulan lalu oleh divisi penelitian dan pengembangan surat kabar terbesar di Indonesia, Kompas, menunjukkan kepada presiden dengan dukungan 49,2 persen dan saingannya pada 37,4 persen, dengan 13 persen dari mereka yang ditanyai ragu-ragu. Ini merupakan peringatan merah bagi petahana untuk memiliki keterpilihan kurang dari 50 persen.

Pemilihan bulan ini, di mana orang Indonesia juga akan memilih anggota parlemen di tingkat regional dan nasional, akan menjadi pertandingan ulang jajak pendapat presiden tahun 2014 yang dimenangkan oleh Widodo dengan selisih 6 persen.

Setelah hampir lima tahun menjabat, banyak pendukung Widodo

telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan abstain dalam pemilihan mendatang sebagai protes atas janji kampanye yang tidak terpenuhi, yang mencakup sumpah untuk memberantas korupsi di kalangan politisi terkemuka dengan penangkapan terbaru dari partai berbasis Islam, yang adalah bagian dari koalisi Widodo.

Bingkai terhadap Joko Widodo juga dikisahkan lewat pendukung yang memiliki kisah beragam untuk bersua dengan presiden idaman. Seperti kisah yang dimuat Arab News pada tanggal 6 April 2019. Air mata mengalir di wajah Lara Hastirini yang berlumur maskara setelah dia menunggu berjam-jam untuk berfoto selfie dengan presiden Indonesia, hanya untuk digagalkan oleh himpitan penggemar wanita lain dengan ide yang sama.

Ini adalah pertarungan tanpa tawanan di jalur pemilihan di negara gila ini, di mana beberapa tembakan dihitung lebih dari dekat dengan pemimpin "orang biasa" Joko Widodo, mantan penjual furnitur yang naik dari perkampungan kumuh sungai ke kantor tinggi.

Hastirini adalah di antara sekitar 10.000 ibu rumah tangga putus asa lainnya, kebanyakan berusia antara 20 dan 50, yang berani membakar panas ketika mereka berteriak dan berdesak-desakan, mendorong penjaga keamanan melewati untuk mencapai Widodo di sebuah acara di Sragen di pulau Jawa minggu ini.

"Saya sedih, saya tidak bisa berfoto dengannya," kata pria 37 tahun itu ketika dia menangis dan meratap.

"Dia sepertinya orang yang baik, agak kebabakan."

Pria kurus, pencinta musik heavy metal berusia 57 tahun, paling dikenal sebagai Jokowi, tampaknya senang kepada ibu rumah tangga dan pemilih kunci lainnya - termasuk milenial yang menyumbang sekitar sepertiga dari pemilih - ketika ia berjuang untuk bertahan dalam perebutan kursi kepresidenan pada 17 April 2019.

Pada tanggal 16 April 2019 Arab News juga memberitakan bagaimana perkembangan pemilu di Indonesia termasuk masalah kampanye. Namun dalam pembahasan ini Arab News juga menyinggung latar belakang calon

presiden. Diberitakan para calon presiden sangat kontras dalam hal latar belakang dan kepribadian. Joko Widodo yang agak kutu buku dikagumi karena sikapnya yang ramah dan bersahaja.

Prabowo Subianto, dari keluarga kaya, rentan terhadap ledakan kemarahan dan memiliki gaya kampanye yang emosional dan keras. Keduanya nasionalis dan Muslim, meskipun nasionalisme Subianto berada di ujung spektrum yang ekstrim.

Kampanye Subianto bersifat negatif dan berdasarkan rasa takut, menekankan apa yang dia lihat sebagai situasi mengerikan Indonesia saat ini dan risiko eksploitasi oleh kekuatan asing atau disintegrasi.

Widodo, pelopor dalam semua jajak pendapat yang kredibel, telah menekankan upaya pemerintahnya untuk meningkatkan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan, dan dapat menunjukkan kemajuan di kedua bidang tersebut.

Bingkai 2, Berita Palsu

Pada 25 Februari 2019 Arab News memberitakan bahwa Indonesia saat ini berjuang melawan berita palsu. Berita ini mengambil setting tiga ibu rumah tangga Indonesia yang ditangkap polisi atas sebuah video online yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan melarang sholat dan menjadikan pernikahan gay di negara mayoritas Muslim itu jika terpilih kembali.

Berita ini juga mengambil pendapat Joko Widodo yang telah menangkis tuduhan atas kepercayaan Muslim selama bertahun-tahun, klaim yang telah dihidupkan kembali menjelang pemilihan presiden April.

Indonesia diberitakan juga telah berjuang melawan gelombang berita palsu dan kampanye informasi yang salah secara online menjelang pemilihan. Video itu, dibagikan ribuan kali secara online, menunjukkan dua wanita berjilbab memberi tahu seorang lelaki tua bahwa Widodo akan mengakhiri panggilan sholat, yang dilakukan lima kali sehari oleh banyak orang di negara Muslim terpadat di dunia.

Dia juga akan memaksa wanita untuk melepaskan jilbab mereka di depan umum dan melegalkan pernikahan gay, yang secara luas ditentang di Indonesia, video itu menyarankan.

Dalam berita ini juga digambarkan bahwa Joko Widodo, yang pertama kali dipilih pada tahun 2014, adalah seorang Muslim yang taat dan tidak pernah secara terbuka mendorong tindakan apa pun yang disebutkan dalam video. Tiga wanita "terkait" dengan video itu ditangkap oleh polisi provinsi Jawa Timur pada hari Minggu atas klaim mereka menyebarkan informasi yang salah.

"Ini adalah tindakan pencegahan karena (video) ini berpotensi memicu kecemasan dan konflik di masyarakat kita," kata juru bicara kepolisian setempat Trunoyudho Wisnu Andiko dalam konferensi pers Senin.

Jika terbukti bersalah, ketiganya bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara karena menyebarkan pidato kebencian dan melanggar undang-undang informasi elektronik.

Framing positif terhadap juga muncul dalam berita tanggal 27 Februari 2019 yang mengutip konferensi pers yang digelar Erick Tohir tentang perlunya kewaspadaan terhadap berita palsu.

Tohir mengatakan penting untuk tidak meremehkan dampak berita palsu, sering beredar di media sosial, dan mengatakan kampanye telah belajar dari pemilu AS 2016 bahwa ada kebutuhan untuk mendorong kembali dalam situasi ini.

"Inilah sebabnya ... ketika ada berita palsu kita perlu membuat pernyataan yang kuat," katanya.

Pengawas pemilu Indonesia melaporkan lonjakan berita palsu selama kampanye di tengah kekhawatiran tentang dampak di negara pengguna media sosial yang sangat tinggi.

"Bapak Jokowi adalah salah satu korban dalam beberapa tahun terakhir," kata Tohir, merujuk pada nama panggilan presiden.

Joko Widodo telah dituduh secara salah dalam desas-desus yang sering menyebar secara online tentang menjadi

Kristen, memiliki keturunan Cina atau menjadi seorang komunis.

Semua itu adalah tuduhan sensitif di negara mayoritas Muslim di mana partai komunis dilarang dan kecurigaan melekat pada kekayaan komunitas etnis Tionghoa dan pengaruh Beijing.

Meski dua calon presiden telah berjanji dalam kampanye utama untuk menjalankan perlombaan yang bersih. Namun pada kenyataannya berita palsu tetap tersebar.

Akibat berita palsu ini, Facebook sebagaimana dilansir Arab News 5 Maret 2019 melarang iklan pemilu untuk pemilihan presiden Indonesia mendatang yang dibeli dari luar negeri. Pengumuman di situs web Facebook mengatakan pembatasan diberlakukan merupakan bagian dari "menjaga integritas pemilu di *platform* kami."

Facebook telah dikritik karena memungkinkan kepentingan asing untuk menggunakan situsnya untuk menyebarluaskan iklan yang mungkin telah mempengaruhi hasil pemilihan presiden AS terakhir dan referendum Inggris tentang meninggalkan Uni Eropa.

Perusahaan media sosial itu mengatakan menggunakan campuran intervensi otomatis dan manusia untuk mengidentifikasi iklan pemilu yang didanai asing.

Pelarangan ini ditengarai karena banyaknya pengguna facebook yang berkelahi di media sosial dengan melakukan ujaran kebencian dan fitnah yang merajalela.

Indonesia juga digambarkan Arab News sebagai medan pertempuran bagi buzzer Facebook dan Twitter saat pemilihan umum. Dalam berita 13 Maret 2019. Tim 'Buzzer', dinamai untuk gebrakan media sosial yang ingin dibuat oleh kelompok-kelompok tersebut, bermunculan di Indonesia menjelang pemilihan presiden tiga buzzer yang terlibat langsung dalam kampanye saat ini menggambarkan bagaimana mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi masing-masing atas nama kandidat.

Arab News menceritakan tentang "Janda," seorang ibu rumah tangga Indonesia yang menggambarkan dirinya sendiri dengan 2.000 pengikut Twitter, memberikan tips gaya hidup, mengeluh

tentang kehidupan kota, dan memuji bagaimana pemerintah Presiden Joko Widodo meningkatkan kehidupannya sebagai seorang ibu muda.

Namun Janda sang ibu rumah tangga tidak ada. Pemilik asli akun Twitter adalah pria paruh baya yang belum menikah yang menawarkan layanan media sosial politik yang mendukung kampanye pemilihan ulang Widodo.

Dia adalah pemimpin dari salah satu dari banyak tim yang disebut "buzzer", dinamai untuk buzz media sosial yang ingin dibuat oleh kelompok-kelompok tersebut, yang bermunculan di Indonesia menjelang pemilihan presiden di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Medan pertempuran kita adalah media sosial. Konten yang kami buat untuk pemilihan mencapai setidaknya satu juta orang per minggu, "kata pemilik akun Janda, menolak disebutkan namanya karena karyanya secara legal berada di wilayah abu-abu.

Berita Arab News mengutip wawancara dengan Reuters, lebih dari selusin anggota tim buzzer, konsultan

media sosial dan pakar cyber menggambarkan serangkaian operasi media sosial yang mereka katakan menyebarkan propaganda atas nama Widodo dan penantanginya, pensiunan jenderal Prabowo Subianto.

Di bawah undang-undang pencemaran nama baik Internet yang luas di Indonesia, membuat dan menyebarkan berita palsu adalah ilegal, tetapi memegang akun media sosial dengan nama palsu tidak, kecuali jika orang yang asli ditiru. Namun perusahaan media sosial kebanyakan menahan akun dengan nama palsu.

Tiga buzzer yang terlibat langsung dalam kampanye saat ini menggambarkan bagaimana mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi masing-masing atas nama kandidat. Satu membantah menyebarkan berita palsu, sementara dua mengatakan mereka tidak peduli tentang keakuratan konten. Kedua tim kampanye menyangkal menggunakan atau menyebarkan berita palsu.

Ross Tapsell, seorang ahli politik dan media di Universitas Nasional

Australia, mengatakan bahwa sudah biasa bagi para calon di Asia Tenggara untuk menyewa ahli strategi kampanye online, yang pada gilirannya memanfaatkan sepasukan orang untuk menyebarkan konten di media sosial. "Jadi tidak ada hubungan langsung sama sekali dengan kandidat," katanya.

Kampanye *buzzer* telah jauh melampaui upaya Facebook dan perusahaan media sosial lainnya untuk mengurangi penciptaan akun palsu dan menyebarkan berita palsu, kata para pakar cyber. Reuters menemukan bahwa sementara akun robot sesekali dihapus, akun palsu yang dipersonalisasi seperti "Janda" tersebar luas di platform Twitter dan Facebook, meskipun melanggar aturan perusahaan.

Informasi yang salah disebar oleh akun nyata - yang sering dikooptasi oleh tim buzzer - merajalela di Facebook dan juga di afiliasi Instagram dan WhatsApp serta layanan saingannya Twitter. Perusahaan mengatakan mereka bekerja dengan pemerintah dan melawan konten palsu. Perwakilan untuk Twitter, Facebook dan Whatsapp mengatakan kepada Reuters bahwa

mereka secara teratur menghapus akun palsu di Indonesia, tetapi menolak untuk membagikan nomor penghapusan.

Seorang jurubicara Twitter mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya sedang berupaya menghapus jaringan akun yang terlibat dalam informasi yang salah dan disinformasi.

Facebook, yang menganggap Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dengan perkiraan 130 juta akun, mengatakan pihaknya melatih badan-badan manajemen pemilihan bagaimana menandai berita palsu kepada perusahaan, yang kemudian dievaluasi oleh para moderator dan dihapus jika melanggar standar komunitasnya.

Bagi Menteri Komunikasi Indonesia Rudiantara, upaya itu tidak cukup. Dia mengatakan pemerintah telah meminta perusahaan media sosial untuk bekerja dengan pihak berwenang untuk membuat prosedur operasi standar yang akan memungkinkan berita palsu dan tipuan untuk ditandai dan diselesaikan. Mereka belum mematuhinya.

“Kami berharap ini akan menjadi lebih buruk ketika kami semakin dekat

dengan pemilihan,” kata Harry Sufehmi, salah satu pendiri Mafindo, sebuah organisasi Indonesia yang memerangi berita palsu, yang mendaftarkan hampir 500 tipuan media sosial terkait dengan politik pada tahun 2018.

Dia adalah salah satu dari tiga ahli yang penelitiannya menemukan bahwa proporsi yang lebih besar dari target informasi yang salah adalah Widodo, dengan beberapa jabatan menggambarkan dia sebagai anti-Islam, antek Tiongkok, atau komunis.

Semua itu merupakan tuduhan yang menjengkelkan di negara yang memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia, di mana partai komunis dilarang dan kecurigaan berlarut-larut atas pengaruh Beijing. Semua bagian dari kampanye informasi yang salah menargetkan Prabowo.

Mencari Uang

Pada suatu sore baru-baru ini di Jakarta, seorang pemimpin tim buzzer menelusuri dua ponsel yang memiliki lebih dari 250 akun Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube dan Twitter, masing-masing dengan persona palsu.

Dia memperbarui lima dari mereka dengan posting yang memuji prestasi Widodo atau mengejek Prabowo dan pasangannya.

Dia membantah menyebarkan informasi yang salah, sebagai gantinya berfokus pada konten yang menceritakan tentang kebajikan kliennya. Tetapi dia mengakui dia memang mencari kotoran pada lawan sebagai bagian dari "paket lengkap" posting dan video yang dia jual seharga 200 juta rupiah (\$ 14.000) per bulan.

Stafnya yang beranggotakan 15 orang, yang ia sebut sebagai "pasukan dunia maya," pada gilirannya memiliki subkontraktor, di seluruh Indonesia, yang banyak di antaranya tidak mengetahui identitas klien, katanya.

Dia mengatakan kepada Reuters bahwa dia disewa oleh penasihat kampanye Widodo. Ace Hasan Syadzily, juru bicara tim kampanye presiden, menyangkal pengetahuan tentang kelompok-kelompok tersebut, tetapi mengatakan "kampanye memiliki kewajiban untuk melawan narasi palsu atau negatif" terhadap Widodo.

Buzzer lain mengatakan dia telah disewa oleh penasihat untuk Prabowo, sementara yang ketiga mengatakan dia memasok layanan ke agen media sosial yang digunakan oleh kedua kampanye. Anthony Leong, koordinator tim digital Prabowo, membantah mereka menggunakan tim buzzer, mencatat bahwa kampanye tersebut mengharuskan "10.000 sukarelawan digital" untuk menggunakan nama asli dan hanya mengizinkan mereka untuk mengirim "konten positif." "Pekerjaan itu menyenangkan"

Menurut buzzers yang diwawancarai, seorang "prajurit cyber" junior dapat dibayar antara 1 juta hingga 50 juta rupiah per proyek tergantung pada jangkauan akun media sosialnya. "Bagi banyak dari kita, pekerjaan itu menyenangkan ... dan gajinya layak," kata buzzer yang mengatakan dia adalah kontraktor untuk agen media sosial yang digunakan oleh kampanye Widodo dan Prabowo.

Dia mengatakan perannya adalah untuk membuat trending topik pada saat-saat penting dalam pemilihan, menggunakan tagar dan konten yang

disediakan oleh agensinya dalam kombinasi dengan akun palsu pribadinya, katanya.

"Bagi saya, tidak ada tipuan atau apa yang disebut konten negatif. Bahannya hanya datang dari klien," katanya kepada Reuters. Pradipa Rasidi, seorang peneliti di Universitas Indonesia, mengatakan sebagian besar buzzers adalah lulusan muda yang melakukannya "karena sulit untuk menemukan pekerjaan setelah universitas dan gajinya lebih tinggi."

Tetapi risiko hukumnya nyata. Aktivitas buzzer dapat dihukum penjara jika dinilai melanggar undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia.

Pada hari pemilihan umum atau 9 April 2019 Arab News kembali menurunkan berita tentang Indonesia yang berperang melawan berita palsu. Diberitakan sekitar 130 juta orang Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam setiap hari di media sosial, salah satu tingkat tertinggi di dunia. Para analis mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang mereka baca tentang 245.000 kandidat tidak benar.

Pertempuran online sangat sengit atas reputasi Presiden Joko Widodo, yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali, dan penantangnya Prabowo Subianto. Keduanya diserang setiap hari dengan laporan palsu dan tajuk berita dokter yang diedarkan oleh penggemar, pencela, dan disewa pembuat berita palsu yang dikenal sebagai buzzers.

Informasi yang salah muncul dalam pemilihan 2014, yang dimenangkan Widodo, kata Ari Nurcahyo, seorang analis politik di think tank Para Syndicate.

"Sekarang jauh lebih sulit untuk dikendalikan sehingga efeknya lebih destruktif, tidak hanya bagi para kandidat tetapi juga bagi masyarakat," katanya.

"Jika tidak ditangani dengan benar maka kita akan memiliki masalah serius bahkan setelah pemilihan."

Ketakutan semakin besar bahwa berita palsu menghancurkan garis-garis kesalahan sosial dan agama terbuka di 260 juta negara Asia Tenggara, yang memiliki minoritas etnis dan agama yang signifikan, termasuk Hindu, Kristen dan Budha.

Reputasi Indonesia untuk toleransi beragama telah diuji dalam beberapa tahun terakhir oleh kekerasan ekstremis dan suara yang semakin menonjol dari kelompok Islam garis keras. “Apa yang membuatku takut adalah ketika tipuan dicampur dengan ucapan kebencian karena mereka sering menggunakan informasi palsu untuk menyebarkan permusuhan di sepanjang garis etnis, ras dan agama,” kata Ferdinandus Setu, juru bicara kementerian komunikasi dan informasi Indonesia.

Kementerian menciptakan 80 orang, tim pemeriksa fakta sepanjang waktu untuk menyanggah tipuan dan berita palsu lainnya, dengan para pejabat mengumumkan hasilnya di jumpa pers reguler. Bergabung dengan upaya itu adalah ratusan sukarelawan di LSM Mafindo, yang merupakan di antara dua lusin organisasi yang tergabung dalam koalisi verifikasi digital bernama CekFakta - yang terhubung dengan outlet berita utama Indonesia.

Widodo, yang masih memimpin Subianto dengan selisih yang lebar, menyalahkan informasi palsu karena

melukai peluangnya di Jawa Barat yang kaya suara, provinsi berpenduduk mayoritas Muslim di negara mayoritas Muslim itu.

Bingkai 3, Politik Uang dan Kerusuhan

Pada tanggal 11 April 2019 Arab News menurunkan berita tentang maraknya politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Dua hal yang menjadi bingkai utama berita ini adalah Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia - memiliki politik uang terburuk di Asia Tenggara. Kedua, walaupun ilegal, politisi dan analis mengatakan relatif jarang melihat penuntutan untuk pelaku suap dalam pemilihan umum di Indonesia.

Arab News memulai dengan kisah Shanti Ramchand salah seorang caleg yang belajar dengan cepat apa yang diharapkan ketika dia mulai berkampanye di Jakarta untuk parlemen nasional Indonesia dia membagikan amplop uang tunai di sebuah acara kampanye kecil, dan hadiah sepeda motor atau unit airconditioning kepada pemimpin masyarakat.

Ramchand, seorang calon politisi dari Partai Demokrat Nasional, bagian dari koalisi Presiden Joko Widodo, sedang mencoba pendekatan baru untuk terpilih. Dia tidak hanya menghindari uang tunai dan hadiah yang secara tradisional diberikan pada jejak kampanye, tetapi membuatnya menjadi pusat perhatian para pemilih.

Indonesia - negara demokrasi terbesar ketiga di dunia - memiliki beberapa politik uang terburuk di Asia Tenggara, menurut para peneliti. Penyerahan uang tunai dan hadiah, kata advokat dan politisi anti-korupsi, menyebabkan korupsi yang merajalela di badan legislatif nasionalnya ketika para kandidat yang berhasil menutup biaya pemilihan mereka, dan lebih banyak lagi, begitu terpilih.

Amplop, biasanya diisi dengan uang tunai mulai dari 20.000 hingga 100.000 rupiah (\$ 1,42 hingga \$ 7,08), biasanya dibagikan kepada para pemilih. Ini jumlah yang kecil, tetapi biaya keseluruhan bisa sangat besar selama enam bulan kampanye.

Berita ini dibumbui dengan penangkapan anggota DPR oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) menyita enam peti penyimpanan di ruang bawah tanah tersembunyi milik Bowo Sidik Pangarso. Bowo adalah seorang anggota parlemen yang mencalonkan diri kembali dari Partai Golkar, partai lain dalam koalisi yang berkuasa di Widodo. Peti berisi 400.000 amplop yang masing-masing diyakini berisi 20.000 rupiah - total 8 miliar rupiah atau lebih dari \$ 566.000.

Bowo, yang telah ditahan tetapi tidak dituntut secara resmi, mengatakan kepada wartawan pekan lalu setelah meninggalkan wawancara dengan badan anti-korupsi bahwa amplop itu untuk pemilihan parlemen nasional, bukan pemilihan presiden, keduanya jatuh tempo pada 17 April.

Meski politik uang dilarang atau ilegal, politisi dan analis mengatakan relatif jarang melihat penuntutan untuk suap waktu pemilu. Dua politisi dari Partai Amanat Nasional, bagian dari koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Prabowo Subianto, dijatuhi hukuman tiga bulan penjara pada bulan Desember karena

membagikan kupon untuk ziarah umrah ke Mekah kepada para pemilih.

Mereka tidak akan didiskualifikasi untuk mencalonkan diri lagi. Pada 2017, ketua parlemen nasional saat itu Setya Novanto ditangkap karena mengatur skema untuk menjarah \$ 173 juta dari kontrak pemerintah untuk kartu identitas elektronik nasional. KPK menuduh sebagian besar uang itu akan disalurkan hingga 60 anggota parlemen. Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, menggarisbawahi mengapa parlemen nasional Indonesia menilai sebagai salah satu lembaga paling korup di negara ini dalam survei.

Cerita ini memperkuat anggapan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang tercemar karena ada politik uang dan korupsi di dalamnya.

'Kleptokrasi'

Dalam sebuah wawancara, Ramchand mengatakan pada tiga dari sepuluh penampilan yang direncanakan, para pemimpin masyarakat akan meminta gratifikasi untuk memungkinkannya berbicara dengan para pemilih dalam pemilihnya di Jakarta Selatan.

"Terkadang orang terang-terangan meminta uang. Yang lain meminta unit pendingin udara atau sepeda motor," katanya kepada Reuters. Ramchand, seorang konsultan kebijakan untuk perusahaan-perusahaan dan pemerintah-pemerintah yang telah tinggal di luar negeri selama sebagian besar dasawarsa terakhir, menunjukkan pesan-pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya oleh para kepala desa dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi keagamaan yang meminta uang agar dia berbicara di pertemuan-pertemuan. Reuters tidak dapat memverifikasi pesan secara independen. Ramchand mengatakan dia juga menolak membayar "mahar" politik yang biasanya diminta oleh partai politik untuk mendukung para kandidat.

Arab News juga mengutip statemen mantan wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas yang mengatakan tarif untuk salah satu dari 560 kursi di legislatif nasional adalah sekitar 10 miliar rupiah, atau \$ 708.000, "Kami hidup dalam kleptokrasi, bukan demokrasi," kata Busyro.

Seorang juru bicara tim kampanye Widodo, Ace Hasan Syadzily, mengatakan partainya sendiri, Golkar, tidak menuntut mahar politik tetapi mengakui "pembelian suara memang terjadi." Presiden menentang politik uang, tambahnya.

Seorang juru bicara untuk koalisi oposisi yang dipimpin oleh Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menolak berkomentar tentang apakah para kandidat harus membayar para pihak untuk disahkan.

"Biaya mencalonkan diri untuk jabatan politik mahal dan berpotensi menjadi penyebab korupsi," katanya. "Kami mendorong partai politik untuk didanai oleh negara dan, jika mereka korup, mereka harus dibubarkan."

Serangan fajar

Puncak dari politik uang di Indonesia adalah serangan fajar. Ramchand mengatakan dia disambut dengan skeptisisme luas bahwa kampanyenya dicantumkan aku bisa bekerja. Dia mengakui bahwa dia harus membatalkan banyak acara.

Sebuah jajak pendapat pemilih di tiga daerah pemilihan Jakarta oleh

lembaga Charta Politika pada bulan Januari menemukan dukungan untuk uang tunai dan persen lainnya di 58,2 persen, 47 persen dan 42,6 persen.

Edward Aspinall, seorang profesor di Universitas Nasional Australia yang telah meneliti politik uang di seluruh Asia Tenggara, mengatakan praktik pemberian uang tunai sangat mengakar di Indonesia.

"Ini lebih umum di Indonesia daripada di tempat lain di Asia Tenggara," katanya.

Dia menyalahkan kemunduran pada pengenalan sistem pemilihan "daftar terbuka" pada tahun 2009 di mana pemilih memilih kandidat, bukan partai, dan adalah kandidat yang menanggung sebagian besar biaya kampanye.

"Insentifnya adalah untuk calon individu untuk memaksimalkan suara pribadi mereka," katanya. "Sangat sering mereka melakukan ini dengan uang. Bagaimana lagi yang bisa Anda bedakan dari saingan dari partai yang sama ketika Anda memiliki kebijakan yang sama? "

Uang tunai untuk suara mencapai puncaknya selama "serangan fajar," pada

pagi hari pemilihan ketika para kandidat mengecam pemilih.

"Ini drama tinggi pada menit terakhir," kata Aspinall. "Calon melihat ini benar-benar tidak efisien dan tidak efektif tetapi mereka merasa jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan mendapat kesempatan."

Kerusuhan

Pada tanggal 15 Mei 2019 Arab News menurunkan berita Indonesia memperketat keamanan menjelang pengumuman presiden terpilih. Dalam berita disebutkan bahwa hampir 32.000 personel polisi dan militer bersiaga di ibukota Jakarta untuk mengamankan acara tersebut. Disebutkan juga pengumuman ini untuk mengonfirmasi penghitungan tidak resmi yang menunjukkan Presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan umum.

Pasukan anti-terorisme Indonesia telah mengumpulkan setidaknya 10 orang yang dicurigai merencanakan serangan selama minggu depan pengumuman hasil pemilihan presiden April yang diperebutkan secara panas. Penangkapan itu terjadi ketika

ketegangan meningkat dan keamanan diperketat dalam demokrasi terbesar ketiga di dunia menjelang pengumuman 22 Mei oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diharapkan untuk mengkonfirmasi penghitungan tidak resmi oleh lembaga survei swasta yang menunjukkan Presiden Joko Widodo memenangkan perlombaan atas mantan jenderal Prabowo Subianto bulan lalu. "Hampir 32.000 personel polisi dan militer bersiaga di ibukota Jakarta, termasuk pasukan yang didatangkan dari provinsi lain, untuk menjaga acara tersebut, kata jurubicara kepolisian nasional Dedi Prasetyo.

"Melalui interogasi, kami menemukan para tersangka berencana menyerang pertemuan massa pada 21, 22 atau 23 Mei," kata Prasetyo, merujuk pada demonstrasi yang direncanakan untuk minggu depan.

"Tujuan mereka adalah menciptakan kekacauan dan menargetkan sebanyak mungkin korban, termasuk polisi."

Para tersangka itu milik Jemaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok

terkait-Daesh terbesar di negara itu, dan pihak berwenang sedang memburu lebih banyak anggota, tambahnya.

Pekan lalu pihak berwenang menembak mati seorang militan Islam dan menahan enam orang karena berencana menyerang polisi selama demonstrasi yang direncanakan.

Prabowo menolak untuk mengakui dan timnya telah membuat tuduhan "kecurangan besar dan penyimpangan" dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. "Kami telah memenangkan mandat rakyat," mantan komandan pasukan khusus itu mengatakan kepada ratusan pendukung pada acara kampanye pada hari Selasa.

"Jika kita menyerah, itu berarti kita menyerah pada ketidakadilan, dan itu berarti kita mengkhianati negara kita sendiri dan orang-orang kita."

Timnya telah mengancam untuk menggunakan "kekuatan rakyat" - protes gaya jalanan, meskipun telah berjanji mereka akan damai.

Dengan lebih dari 80 persen surat suara dihitung, Widodo memimpin dengan 12

point persentase, dengan 56 persen suara, kata komisi pemilihan.

Pada tanggal 17 Mei 2019 Arab News juga menurunkan berita bahwa polisi telah menangkap puluhan pelaku teror sebelum hasil jajak pendapat atau hitung cepat. Beberapa tersangka yang ditangkap adalah pembuat bom yang terampil dan telah bertarung bersama kelompok militan Daesh di Suriah.

Sekitar 29 tersangka ditangkap bulan ini sendirian, dengan 60 di antaranya ditahan sejak awal tahun dalam penggerebekan di seluruh negara Asia Tenggara, kata mereka.

Delapan tersangka lainnya tewas dalam konfrontasi dengan pihak berwenang, kata polisi, termasuk istri seorang gerilyawan yang meledakkan dirinya dan seorang anak menyusul perselisihan dramatis di rumah mereka pada Maret.

Beberapa tersangka yang ditangkap adalah pembuat bom yang terampil dan telah berjuang bersama kelompok militan di Suriah, serta anggota jaringan ekstrimis lokal Jemaah Anshurat Daulah (JAD), kata polisi.

JAD telah menjanjikan kesetiaan kepada Daesh dan disalahkan atas gelombang pemboman bunuh diri di gereja-gereja di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia tahun lalu.

Negara mayoritas Muslim terbesar di dunia telah menyaksikan serangkaian serangan oleh gerilyawan Islam sejak pemboman Bali tahun 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk sejumlah turis.

Juru bicara kepolisian nasional Muhammad Iqbal menggambarkan penangkapan terbaru sebagai "serangan pencegahan" sebelum pengumuman resmi pemilihan Indonesia, yang diadakan pada 17 April.

Ada kekhawatiran tentang demonstrasi jalanan setelah penantang presiden Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal militer, memperingatkan bahwa protes dapat meletus atas klaimnya tentang kecurangan pemilu yang besar-besaran. Subianto telah bersumpah untuk tidak mengakui hasil minggu depan jika mereka menyerahkan kemenangan pemilihan kembali kepada presiden Joko Widodo, yang memiliki keunggulan

sekitar 12 poin persentase, menurut jajak pendapat tidak resmi.

Polisi mengatakan gerilyawan ingin mengambil keuntungan dari kerusuhan politik untuk memicu kekacauan dengan menggunakan WiFi untuk meledakkan tas ransel berisi bom dari jarak jauh pada demonstrasi yang ramai.

Pada 21 Mei 2019 Arab News kembali menurunkan berita bahwa mantan jenderal Prabowo Subianto, telah menolak untuk menerima kekalahan dan menyatakan dirinya sebagai pemenang bulan lalu. Polisi juga telah menangkap 31 gerilyawan Islam yang mereka katakan berencana untuk meledakkan bom selama protes jalanan yang diharapkan terhadap hasil pemilihan. Subianto menuduh kecurangan pemilu besar-besaran di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu tetapi belum memberikan bukti yang kredibel.

Suara dihitung secara publik dan komisi memposting formulir tabulasi dari setiap TPS di situs webnya, memungkinkan untuk verifikasi independen. Dalam sebuah video yang

dirilis setelah hasilnya diumumkan, Subianto kembali menolak untuk mengakui kekalahan tetapi meminta para pendukung untuk menahan diri dari kekerasan.

Tanggal 22 Mei 2019 kerusuhan benar-benar terjadi. Arab News menulis, pendukung kandidat presiden yang gagal bentrok dengan pasukan keamanan dan membakar asrama polisi dan kendaraan di ibukota Indonesia pada hari Rabu setelah rilis hasil pemilihan resmi.

“Situasi berubah menjadi kekerasan ketika para demonstran mencoba memaksa masuk ke kantor badan pengawas pemilu dan bentrokan berlanjut sepanjang malam,” kata juru bicara Kepolisian Nasional Dedi Prasetyo. Lebih dari 20 tersangka provokator ditangkap, katanya.

KompasTV menunjukkan pengunjung rasa melemparkan batu, asrama polisi paramiliter terbakar, dan ratusan polisi anti huru hara di lingkungan pusat. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air terhadap pengunjung rasa yang melemparkan batu, bom molotov, dan membakar proyektil.

Pemerintah telah mengerahkan sekitar 50.000 polisi dan tentara di Jakarta untuk mengantisipasi protes. Banyak warga telah meninggalkan kota dan bagian-bagian pusat kota ditutup untuk macet dengan badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan dibarikade dengan kawat berduri.

Dalam sepekan terakhir, pihak berwenang telah menangkap tiga aktivis pro-Subianto atas tuduhan pengkhianatan, kata Prasetyo, termasuk seorang pensiunan jenderal dan mantan komandan pasukan khusus Indonesia. Polisi menuduh ada rencana untuk menyita bangunan-bangunan penting pemerintah di Jakarta.

Kesimpulan

Dari analisis framing yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: pertama, bingkai Joko Widodo digambarkan sebagai sosok yang sederhana dan dicintai rakyat, tidak memegang partai politik, sosok yang memperjuangkan proyek ambisius untuk membangun jalan, bandara, dan infrastruktur lain yang sangat

dibutuhkan di seluruh kepulauan lebih dari 17.000 pulau, termasuk sistem angkutan cepat massal pertama di Jakarta.

Joko Widodo juga mengantar atau memperluas skema pembangunan kesehatan dan sosial populer, termasuk uang tunai untuk masyarakat miskin pedesaan. Tetapi Joko Widodo juga digambarkan mengalami serangan-serangan diskriminatif karena dianggap tidak tegas terhadap komunitas kecil LGBT Indonesia selama masa jabatannya, dan kasus-kasus intoleransi tingkat tinggi yang diarahkan pada kelompok-kelompok minoritas agama di negara mayoritas Muslim.

Dia juga dituduh merayap otoriterianisme menyusul penangkapan para pegiat oposisi dan undang-undang yang direvisi yang memungkinkan Jakarta melarang organisasi massa. Dipandang sebagai orang yang lemah dan jauh dari kedalaman di tahun pertamanya menjabat, Joko Widodo mengkonsolidasikan kekuasaan sebagian dengan menunjuk jenderal-

jenderal angkatan darat Soeharto ke posisi-posisi penting.

Adapun rivalnya Prabowo Subianto, digambarkan sebagai mantan jenderal - dan mantan suami dari satu putri Soeharto - menghadapi perjuangan berat lainnya pada tahun 2019, tertinggal dua digit dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum. Prabowo juga diberitakan berkali-kali mencoba dan gagal memenangkan jabatan tinggi beberapa kali selama 15 tahun terakhir, termasuk pencalonan wakil presiden tahun 2009 yang gagal. Prabowo diberitakan terikat oleh ikatan dengan keluarga Soeharto dan masa lalu yang kelam. Prabowo Subianto memerintahkan penculikan aktivis demokrasi pada hari-hari terakhir pemerintahan diktator pada tahun 1998 dan telah dituduh melakukan kekejaman di Timor Timur. Dia dipecat dari militer karena penculikan.

Prabowo Subianto telah berusaha menggambarkan dirinya sebagai pembela bangsa yang akan meningkatkan pengeluaran militer, dan menuduh Widodo menjual negara kaya

mineral itu untuk kepentingan asing, termasuk Cina. Dia telah mendekati kelompok garis keras Islam dan - meskipun dirinya sendiri sangat kaya - mencerca para elit negara, mengklaim mereka mengeksploitasi orang miskin.

Beberapa komentator mengatakan bahwa pria 67 tahun yang berpendidikan di luar negeri ini percaya dia ditakdirkan untuk memimpin Indonesia. Sandiaga Uno digambarkan sebagai seorang mantan pemodal berusia 49 tahun yang dilaporkan telah menghabiskan sekitar \$ 100 juta dari kekayaannya sendiri untuk kampanye ini, telah populer di kalangan milenial dan ibu rumah tangga.

Kedua, berita palsu. Indonesia dinilai sebagai negara yang sedang berjuang melawan berita palsu yang di dalam termuat ujaran kebencian dan fitnah. Diberitakan sekitar 130 juta orang Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam setiap hari di media sosial, salah satu tingkat tertinggi di dunia. Para analis mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang mereka baca tentang 245.000 kandidat tidak benar.

Pertempuran online sangat sengit atas reputasi Presiden Joko Widodo, yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali, dan penantangnya Prabowo Subianto. Keduanya diserang setiap hari dengan laporan palsu dan tajuk berita yang diedarkan oleh penggemar, pencela, dan pembuat berita palsu disewa yang dikenal sebagai buzzers.

Ketiga, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang juga dihiasi politik uang dan kerusuhan. Dua hal yang menjadi bingkai utama berita Arab News adalah Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia - memiliki politik uang terburuk di Asia Tenggara. Kedua, walaupun ilegal, politisi dan analis mengatakan relatif jarang melihat penuntutan untuk pelaku suap dalam pemilihan umum di Indonesia.

Tanggal 22 Mei 2019 kerusuhan benar-benar terjadi. Arab News menulis, pendukung kandidat presiden yang gagal bentrok dengan pasukan keamanan dan membakar asrama polisi dan kendaraan di ibukota Indonesia pada hari Rabu setelah rilis hasil

pemilihan resmi. Situasi berubah menjadi kekerasan ketika para demonstran mencoba memaksa masuk ke kantor badan pengawas pemilu dan bentrokan berlanjut sepanjang mala

Daftar Pustaka

- Al-Rawi AK (2015) Sectarianism and the Arab Spring: Framing the popular protests in Bahrain. *Global Media and Communication* 11(1): 25-42.
- Arab News (2016a) About us. *Arab News*. Available at: <http://www.arabnews.com/node/51199/about-us> (Accessed 25 April 2019)
- Bosman J and D'Haenens L (2008) News reporting on Pim Fortuyn: Framing in two Dutch news-papers. *Media, Culture & Society* 30(5): 735-748.
- Bowe BJ and Makki TW (2015) Muslim neighbors or an Islamic threat? A constructionist framing analysis of newspaper coverage of mosque controversies. *Media, Culture & Society* 38(4): 540-558.
- Dekavalla M (2016) Framing referendum campaigns: The 2014 Scottish independence referendum in the press. *Media, Culture & Society* 38(6): 793-810.
- Entman RM (1993) Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication* 43(4): 51-58.
- Entman RM (1991) Framing US coverage of international news: Contrasts in narratives of the KAL and Iran air incidents. *Journal of Communication* 41(4): 6-27.
- Gitlin T (1980) *The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Guzman AL (2016) Evolution of news frames during the 2011 Egyptian Revolution. *Journalism & Mass Communication Quarterly* 93(1): 80-98.
- Isakhan B (2014) The Politics of Australia's Withdrawal from Iraq. *Australian Journal of Political Science* 29(4): 647-661
- Isakhan B (2007) Media discourse and Iraq's democratisation. *Australian Journalism Review* 29(1): 93-110.
- McCombs ME and Shaw DL (2006) The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly* 36(2): 176-187.
- Miller M (1997) Frame mapping and analysis of news coverage of contentious issues. *Social Science Computer Review* 15(4): 367-378.
- Mulherin P and Isakhan B (2019) The abbot government and the islamic state: An elitist foreign policy

- discourse. *Australian Journal of Political Science* 54(1): 82-98.
- Nambiar P (2014) Framing sustainability: A case study analysis of the environment and sustainability discourse in the Indian English language press. *Global Media and Communication* 10(1): 93-110.
- Nwokora Z and Brown LM (2017) Narratives of a race: How the media judged a presidential debate. *American Politics Research* 45(1): 33-62.
- Pan Z and Kosicki GM (1993) Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication* 10(1): 55-75.
- Powell KA (2011) Framing Islam: An analysis of U.S. media coverage of terrorism since 9/11. *Communication Studies* 62(1): 90-112.
- Rane H and Ewart J (2012) The framing of Islam and Muslims in the tenth anniversary coverage of 9/11: Implications for reconciliation and moving on. *Journal of Muslim Minority Affairs* 32(3): 310-322.
- Rubin B (2006) *The Long War for Freedom: The Arab Struggle for Democracy in the Middle East*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Rugh WA (2004) *Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television in Arab Politics*. Westport, CT: Praeger.
- Schaefer TM (2004) Framing the US embassy bombings and September 11 attacks in African and US newspapers. In: Norris P, Kern M and Just M (eds) *Framing Terrorism: News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge, pp.93-112.
- Strömbäck J and Dimitrova DV (2006) Political and media systems matter: A comparison of election news coverage in Sweden and the United States. *The International Journal of Press/Politics* 11(4): 131-147.
- Tuchman G (1978) *Making News: A Study of the Construction of Reality*. New York: Free Press.
- Yamani M (2008) The two faces of Saudi Arabia. *Survival* 50(1): 143-156.
- Zayani M (2012) Transnational media, regional politics and state security: Saudi Arabia between tradition and modernity. *British Journal of Middle Eastern Studies* 39(3): 307-327.